



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARSYADANY GHANA AKMALAPUTRI
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT UMUM DAN ASET PROPERTI
3. NHK : 205017

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.576.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/67 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
3. Tanah Seluas 1314 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 127 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/70 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/102 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.076.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 905.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET TRAILBLAZER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI KLX150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, CRV BLACK EDITION Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.200.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	723.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.265.200.000
III. HUTANG	Rp.	2.052.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.213.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.